

# **Sampai Kapan Papua Bergejolak?**

## **Kajian Strategis Atas Konflik Politik dan Konflik Sumber Daya di Papua**

**Oleh Reza A.A Wattimena**

**Dr. der Phil. Reza Alexander Antonius Wattimena.** *Peneliti di bidang Filsafat Politik, Filsafat Ilmu dan Kebijakan Timor. Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Doktor Filsafat dari Hochschule für Philosophie München, Philosophische Fakultät SJ München, Jerman. Pernah mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Airlangga, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Presiden, Universitas Multimedia Nusantara dan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Beberapa karyanya: **Menjadi Pemimpin Sejati (2012), Filsafat Anti Korupsi (2012), Tentang Manusia (2016), Filsafat dan Sains (2008), Zen dan Jalan Pembebasan (2018), Melampaui Negara Hukum Klasik (2007), Demokrasi: Dasar dan Tantangannya (2016), Bahagia, Kenapa Tidak? (2015), Cosmopolitanism in International Relations (2018), Memahami Ilmu Hubungan Internasional Kontemporer (2019), Protopia Philosophia (2019)** dan berbagai karya lainnya di surat kabar, website, jurnal ilmiah maupun buku.*

### **Abstrak**

Tulisan ini merupakan kajian atas akar konflik politik maupun sumber daya di Papua. Persoalan HAM sudah menjadi persoalan lama di Papua. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi terhadap masyarakat Papua, dan seringkali tidak ditanggapi dengan tepat. Hal ini terkait erat dengan konflik politik maupun konflik sumber daya yang terjadi di Papua. Sampai sekarang, sebagian masyarakat Papua masih mempertanyakan legitimasi kekuasaan Indonesia atasnya. Permasalahan menjadi semakin rumit, ketika sumber daya alam Papua dikeruk oleh para pendatang, terutama perusahaan bisnis yang bekerja sama dengan militer dan pemerintah Indonesia, namun tidak memberikan sumbangan nyata bagi perkembangan Papua secara menyeluruh. Kerja sama yang adil dan sistematis antara pemerintah Indonesia, masyarakat Papua dan komunitas internasional kiranya amat penting untuk menyelesaikan konflik multidimensional yang terjadi di Papua.

**Kata Kunci: Konflik Politik, Konflik Sumber Daya, Pelanggaran HAM Papua, Kerja Sama Internasional**

### **Abstract**

This paper is a study of the roots of political and resource conflicts in Papua. The issue of human rights has long been a problem in Papua. Various human rights violations continue to occur against the people of Papua, and often are not responded appropriately. This is closely related to political and resource conflicts that occur in Papua. Until now, some Papuans still question the legitimacy of Indonesia's power over it. The problem becomes even more complicated, when Papua's natural resources are exploited by migrants, especially business companies that work closely with the Indonesian military and government, but do not make a real contribution to the overall development of Papua. Fair and systematic cooperation between the Indonesian government, the people of Papua and the international community would be very important to resolve the multidimensional conflict that occurred in Papua.

**Keywords: Political Conflict, Resource Conflict, Papua Human Rights Violations, International Cooperation**

Papua merupakan salah satu daerah yang paling bergejolak di Indonesia. Selama puluhan tahun, berbagai konflik politik, ekonomi sampai dengan militer terjadi di sana. Rakyatnya juga masih banyak yang hidup dalam kemiskinan serta keterbelakangan, walaupun alamnya memiliki kekayaan alam yang amat besar. Sampai detik tulisan ini dibuat, berbagai bentuk persoalan pelanggaran HAM dan ketidakadilan ekonomi juga masih belum mendapatkan jalan keluar yang memadai. Di dalam berbagai krisis tersebut, tuntutan Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia pun terus berkumandang.

Tulisan ini berupaya untuk memahami akar dari krisis di Papua, sekaligus mengajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai jalan keluarnya. Awalnya, tulisan ini akan memberikan kerangka untuk memahami akar konflik di Papua, terutama konflik politik dan konflik terkait dengan sumber daya. Berikutnya, tulisan ini akan merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk menyelesaikan konflik di Papua. Tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan.

### **1. Konflik Politik dan Sumber Daya di Papua**

Papua adalah pulau yang terus berubah. Di era globalisasi ini, perubahan sosial menghantam begitu dalam ke sisi-sisi budaya masyarakat Papua. Masuknya industri dan investasi terjadi begitu pesat, setelah Orde Baru, di bawah perintah Suharto, menciptakan program “Kebijakan Ke Arah Timur”. Perubahan sosial budaya juga amat besar terjadi, setelah kebijakan otonomi daerah berlaku.<sup>1</sup> Para pelaku bisnis dan industri pun kini menjadikan Papua sebagai lahan keuntungan mereka, terutama terkait dengan sumber daya alam.

Papua memang sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam, mulai dari perikanan, perkayuan, pertanian sampai beragam jenis pertambangan. Namun, walaupun kaya akan sumber daya alam, masyarakat Papua tidak langsung merasakan keadilan dan kemakmuran yang diharapkan. Justru para pendatang, yang merupakan pelaku bisnis dan industri, yang merasakan kemakmuran. Sebaliknya, masyarakat dan alam Papua justru mendapatkan kerugian, akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kemiskinan dan kerusakan alam justru banyak terjadi.

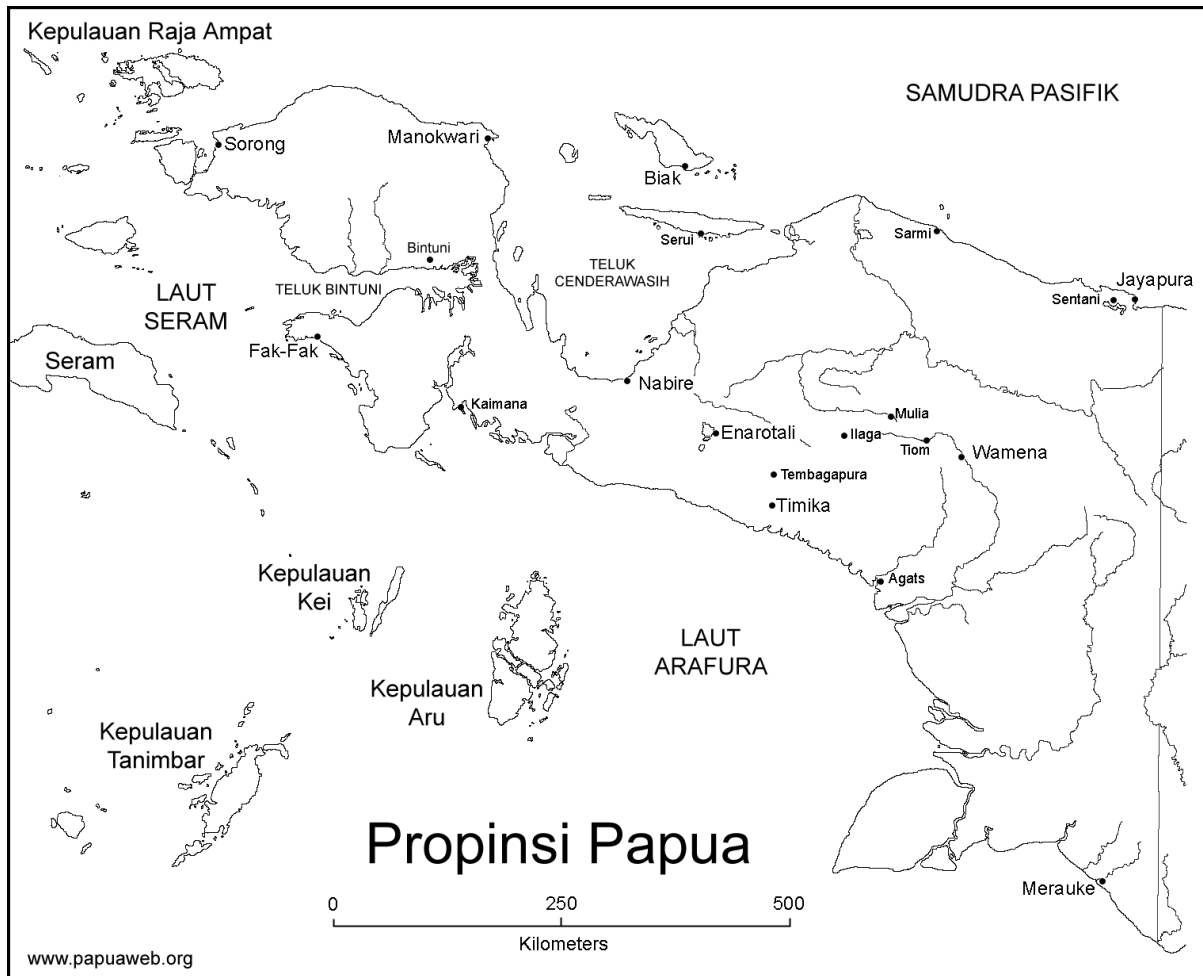
Salah satu yang paling jelas adalah industri perikanan di daerah pantai. Selama bertahun-tahun, nelayan setempat bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Namun, dengan adanya modernisasi industri perikanan, keadaan itu mulai berubah. Banyak nelayan tradisional mulai kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.<sup>2</sup> Ini terjadi, karena kegiatan modernisasi industri tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat setempat.

---

<sup>1</sup> Kerangka mengikuti (Kompas 2019)

<sup>2</sup> *Ibid.*

**Gambar 1.**  
**Peta Papua<sup>3</sup>**



Akibatnya, perubahan sosial, ekonomi dan budaya justru merugikan masyarakat setempat. Tidak hanya manusia Papua yang menjadi korban. Keseimbangan ekosistem alam juga terganggu. Ini sebenarnya kisah klasik dari modernisasi di berbagai negara. Pola yang sama terjadi di Papua, karena tidak ada tindak lanjut nyata tentang ini dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sebagian masyarakat Papua masih hidup dalam isolasi. Mereka memiliki budaya dan cara hidup yang sudah bertahan begitu lama. Ketika proses industrialisasi terjadi, dengan banyaknya modal dan manusia yang masuk dari tanah lain, perubahan tak bisa dihindari. Beberapa kelompok masyarakat gagal melakukan adaptasi, sehingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Inilah salah satu alasan terbesar dari kericuhan di Manokwari, Papua pada bulan Agustus 2019 lalu.

Perubahan akan menghasilkan konflik, jika tidak dikelola dengan baik. Harapan akan kemajuan akan berjumpa dengan kenyataan yang penuh kemiskinan dan ketidakadilan. Pemerintah berperan penting untuk mendamaikan keadaan dalam hal ini. Namun, sampai sekarang, tugas itu belum dijalankan dengan baik. Kepentingan masyarakat lokal masih sering dikorbankan demi kepentingan para pemilik modal raksasa yang menguasai industri.

<sup>3</sup> Lihat (Papua Web n.d.)

Hal ini ditambah dengan diskriminasi dan rasisme yang dialami warga Papua di Jawa, terutama di Surabaya dan Malang. Mereka dianggap warga kelas dua, dan seringkali menjadi korban kekerasan dari warga setempat. Ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ia dibiarkan begitu saja, sehingga menjadi bara dalam sekam yang siap memicu konflik di masa depan. Beragam konflik yang terjadi di Papua terjadi, karena perpaduan dari sebab-sebab ini.

Di dalam kegelapan, tuntutan kemerdekaan pun berkumandang.<sup>4</sup> Selama bertahun-tahun, tuntutan ini kerap ditanggapi dengan pengerahan pasukan keamanan. Akibatnya, hidup masyarakat Papua kini penuh dengan pelanggaran HAM, konflik politik dan persaingan bisnis yang tak sehat. Ini sudah berlangsung, sejak Suharto menjadi Presiden Indonesia di akhir dekade 1960-an. Pada saat itu, Papua menjadi bagian dari Indonesia dalam keadaan perang dingin dan kepentingan kapitalisme atas sumber daya alam.

Pada 1945, Indonesia menginginkan semua bekas wilayah penjajahan Belanda masuk ke dalam wilayahnya. Papua pun termasuk di dalamnya. Pada kala itu, Papua dikenal dengan *Netherlands New Guinea*. Secara etnis dan budaya, Papua amat berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Pada 1962, dengan bantuan Amerika Serikat, kesepakatan pun dicapai.

Belanda menyerahkan Papua kepada PBB pada Oktober 1962. Lalu, pada 1 Mei 1963, Belanda harus menyerahkan Papua bagian Barat ini kepada pemerintah Indonesia. Ironisnya, walaupun menyangkut nasib Papua, namun tidak ada orang Papua yang dilibatkan di dalam perjanjian. Menanggapi ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan pemilihan bebas tentang keinginan sesungguhnya rakyat Papua dalam hubungan dengan Indonesia.

14 Juli sampai 2 Agustus 1969, Penentuan Pendapat Rakyat pun dilakukan. Tujuannya adalah menentukan, apakah penduduk Papua mau tetap bergabung dengan Indonesia, atau memilih untuk mandiri. 1026 orang mewakili 815.904 penduduk Papua pada waktu itu. Mereka disebut juga sebagai Dewan Musyawarah Pepera, dan terdiri dari 400 kelapa suku dan adat, 360 orang unsur daerah dan 266 orang dari kelompok masyarakat. Keputusan akhir dicapai, dan Papua memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia.

Kritik paling tajam adalah, bahwa semua proses tersebut korup. Perwakilan orang-orang Papua dianggap tidak mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Tekanan militer digunakan untuk mengancam orang-orang Papua, supaya mau bergabung dengan Indonesia. Bahkan, menurut beberapa penelitian, Presiden Suharto, yang baru saja merampas kekuasaan dari Presiden Sukarno, sudah menandatangani perjanjian pengolahan sumber daya alam dengan perusahaan Amerika Serikat. Semua ini selalu menjadi halangan bagi proses integrasi yang utuh dan adil antara Papua dan Indonesia.

Perdebatan tidak berhenti disitu. Di satu sisi, banyak unsur masyarakat Papua yang meragukan kekuatan hukum dari Pepera yang telah terjadi. Terlalu banyak unsur politik busuk yang bermain di dalamnya. Bahkan, untuk memenuhi kuota, beberapa pihak berpendapat, orang-orang non-Papua juga dilibatkan. Untuk proses yang sangat penting semacam ini, hal-hal di atas tidaklah dapat diterima.

Di sisi lain, pihak Indonesia terus menekankan, bahwa Pepera adalah dasar hukum yang kokoh bagi integrasi Papua dan Indonesia. Pepera adalah proses internasional yang melibatkan PBB. Sistem perwakilan semacam ini juga sejalan dengan budaya Papua. Bahkan, di dalam pemilu, sistem ini juga digunakan.

---

<sup>4</sup> Kerangka mengikuti (Nicky Aulia Widadio n.d.)

Komunitas internasional juga sudah menerima hasil Pepera. Seharusnya, sejak 1949, yakni pada Konferensi Meja Bundar, Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia.

Penjelasan tersebut rupanya tidak memuaskan sebagian rakyat Papua. Perlawanan pun terus dilakukan, bahkan melebar ke bidang militer. Organisasi Papua Merdeka pun dibentuk untuk melakukan perlawanan di bidang politik dan militer terhadap pemerintah Indonesia. Konflik pun pecah di beberapa tempat di Papua, mulai dari Manokwari sampai dengan Timika. Kegiatan pertambangan Freeport juga memicu perlawanan militer serupa.

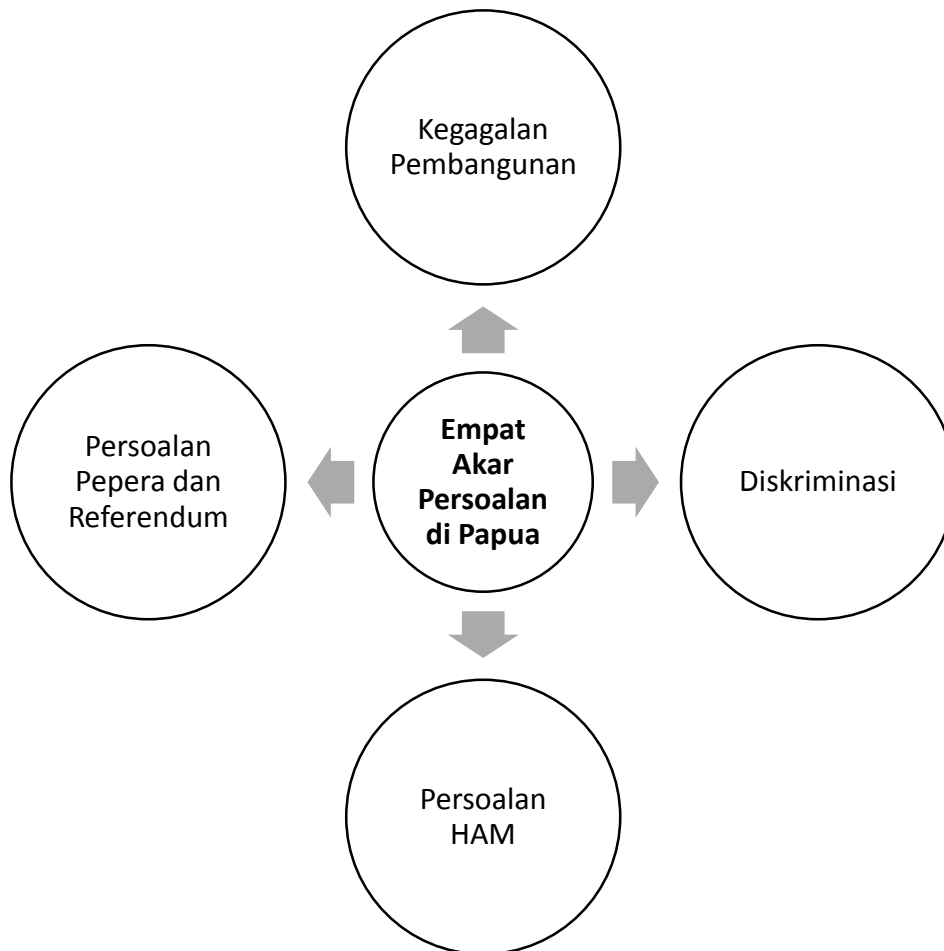
Pada 1977, konflik militer semakin membesar. Sekitar 200 orang menyerang Freeport. Pemerintah Indonesia membalas dengan menerapkan operasi militer. Perlu diketahui, bahwa tanah Freeport adalah tanah adat yang sebelumnya dimiliki oleh beberapa suku di Papua. Di dalam konflik dengan tentara Indonesia, sekitar 60 orang Papua tewas terbunuh. Ini menjadi salah satu konflik yang mewarnai pergulatan Papua dalam hubungannya dengan Indonesia.

Di 2019 ini, konflik dan kekerasan terus berlangsung. Pola yang sama juga terus berulang. Setiap tuntutan rakyat Papua selalu disambut dengan pendekatan militer. Pendekatan militer juga terus disambut dengan perlawanan militer oleh sebagian rakyat Papua. Papua terus menjadi tempat pembunuhan dan beragam bentuk pelanggaran HAM berat terhadap warganya di 2019 ini.

Tuntutan untuk merdeka pun tak terhindarkan. Dunia internasional juga sudah lama memperhatikan konflik yang terjadi di Papua. Banyak pelanggaran HAM yang terus diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Diskriminasi dan rasisme terhadap orang-orang Papua pun terus terjadi. Sampai detik tulisan ini dibuat, pemerintah Indonesia hanya menggunakan dua pendekatan untuk mengurai masalah di Papua, yakni pendekatan ekonomi (pembangunan infrastruktur) dan pendekatan militer. Ini tidak cukup.

Sudah sejak lama, pendekatan ekonomi dilakukan di Papua. Pemekaran propinsi sekaligus aliran investasi sudah lama dilakukan, terutama sejak era reformasi. Namun, tidak banyak kemajuan berarti yang terjadi. Pada 2018, indeks pembangunan manusia Papua menempati peringkat terendah di seluruh Indonesia. Pendekatan ekonomi hanya mencoba mengobati gejala masalah di Papua, dan tak pernah sungguh menyentuh akar permasalahan yang ada.

**Bagan 1.**  
**Akar Persoalan Papua**



Secara umum, ada empat akar persoalan yang kerap kali diabaikan di Papua. Yang pertama adalah kegagalan pembangunan. Ini ditandai dengan gagalnya pemerintah Indonesia memberikan kemakmuran yang merata terhadap orang-orang Papua. Masih banyak suku yang hidup dalam kemiskinan, dan tak merasakan buah pembangunan. Padahal, tanah Papua amatlah kaya, dan seringkali hanya memperkaya para pendatang semata.

Ini terkait dengan akar persoalan kedua, yakni diskriminasi terhadap orang-orang Papua. Di berbagai tempat di Indonesia, orang-orang Papua mengalami diskriminasi. Mereka seringkali tidak mendapatkan pelayanan hukum, kesehatan ataupun pendidikan yang selayaknya. Konflik pun seringkali dipicu, akibat diskriminasi yang bersifat sistematis ini. Perpaduan antara ketidakadilan, kemiskinan dan diskriminasi membuat banyak orang Papua memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Akar persoalan ketiga adalah soal kekerasan dan pelanggaran HAM berat di Papua. Sampai 2019 ini, kekerasan terhadap orang-orang Papua masih sering terjadi. Pendekatan militer Indonesia terhadap persoalan Papua adalah penyebab utama soal ini. Tidak hanya itu, beberapa pelanggaran HAM berat di masa lalu juga masih belum ditanggapi secara tepat. Ini menjadi bara dalam sekam di dalam masyarakat Papua yang bisa menciptakan konflik baru di masa datang, jika tak ditanggapi secara bijak.



Di masa pemerintahannya yang pertama, Jokowi sama sekali tidak menyinggung persoalan pelanggaran HAM berat di Papua. Pembangunan manusia Papua melalui pendidikan dan kesehatan yang bermutu tinggi juga tak masih tersendat. Pemerintah hanya terfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur semata. Inilah yang disebut sebagai pembangunan „ala Jakarta“ yang tak menyentuh persoalan keadilan dan kemakmuran masyarakat Papua. Ini juga menyentuh persoalan politik militer dengan hadirnya kelompok bersenjata.

Selama ini, pemerintah Indonesia melihat kelompok ini sebagai kelompok kriminal belaka. Namun, kenyataan berbicara berbeda. Kelompok ini tidak hanya melakukan perlawanan bersenjata secara acak, melainkan memiliki tujuan politik. Hal inilah yang cenderung diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, tidak ada pendekatan yang tepat untuk menghentikan konflik, sekaligus menciptakan perdamaian yang lestari di Papua.

Konflik Papua juga tidak bisa dipisahkan dari perebutan sumber daya alam di sana.<sup>5</sup> Papua adalah tanah yang sangat kaya dengan berbagai bentuk sumber daya alam. Di mata banyak masyarakat Papua, pemerintah Indonesia gagal mengelola sumber daya alam secara adil. Keadaan politik yang sudah panas semakin memperparah keadaan, terutama jika dipadukan kegagalan mengelola sumber daya yang ada ini. Kerap kali, pemerintah Indonesia memberikan ijin pengolahan tambang terhadap banyak perusahaan, tanpa mempertimbangkan keinginan dan kepentingan masyarakat lokal Papua.

Industri terbesar di Papua adalah industri kayu. Namun, praktek bisnisnya jauh dari ideal. Masyarakat lokal ditipu oleh perusahaan pendatang, sehingga mereka hanya menerima sedikit keuntungan ekonomi. Ini semua ditambah dengan kerusakan lingkungan, akibat praktek perusahaan kayu yang ilegal dan merusak. Pada 2001, pemerintah sudah melarang ekspor kayu dari seluruh Indonesia. Namun, sampai sekarang, aturan itu sama sekali tidak dipatuhi.

Industri lainnya yang berkembang di Papua adalah pertambangan. Sampai detik tulisan ini dibuat, pertambangan emas dan kopra oleh Freeport masih menjadi pertambangan yang paling bermasalah di Indonesia. Ini terjadi, karena Freeport memperoleh ijin pertambangan dari pemerintah Orde Baru di bawah Suharto. Banyak sekali kasus terkait sepak terjang Freeport yang merugikan masyarakat lokal Papua. Polisi dan para penegak hukum seringkali hanya menjadi pelindung perusahaan, dan bukan pelindung rakyat sebagai keseluruhan.

Industri perikanan dan pertambangan juga mengundang banyak imigran dari luar Papua untuk masuk. Tegangan dengan masyarakat lokal pun berkembang, terutama dalam bentuk diskriminasi. Perusahaan multinasional kerap kali bekerja sama dengan para pendatang dari luar Papua untuk mengeruk kekayaan alam disana. Ini dilakukan dengan menipu masyarakat lokal yang memang tak sadar akan betapa berharganya tanah yang mereka tempati. Alhasil, para pendatang dan perusahaan internasional semakin kaya, sementara masyarakat Papua tetap hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Papua juga sangat kaya dengan gas alam. Bahkan, beberapa ahli berpendapat, bahwa sumber gas alam di Papua adalah salah satu yang terbesar di dunia.<sup>6</sup> Masyarakat sekitar seharusnya bisa diuntungkan dengan keberadaan berbagai tambang gas alam di sekitarnya. Namun, kehadiran industri semacam ini juga bisa menciptakan banyak kerusakan lingkungan, sekaligus mengancam budaya lokal. Jika

---

<sup>5</sup> Kerangka mengikuti (Irawan n.d.)

<sup>6</sup> *Ibid*

tidak dikelola dengan baik, konflik bisa banyak tercipta, akibat keberadaan sumber gas alam raksasa ini.

Di dunia yang semakin kompleks, kebutuhan akan sumber daya alam terus meningkat. Namun, keberadaan sumber daya alam amatlah terbatas. Ini membuat pemburuan sumber daya alam menjadi amat agresif, dan seringkali melanggar hukum maupun rasa keadilan yang ada. Masyarakat lokal pun kerap menjadi korban, akibat pemburuan sumber daya alam yang melanggar hukum. Inilah pola yang terjadi di Papua.

Konflik Papua memang amat terkait dengan sumber daya alam dan tanah. Kekayaan yang lahir dari melimpahnya sumber daya alam tidak dibagi secara adil. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan yang memuaskan antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua soal hal ini. Keadaan ini membuat konflik kerap terjadi antara masyarakat lokal dengan aparat hukum. Bahkan, di banyak tempat, aparat hukum kerap kali bersikap tidak adil dengan memihak pada kepentingan pemerintah dan perusahaan, sambil mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia terkait konflik di Papua adalah dengan penciptaan daerah istimewa di Papua. Tujuannya supaya Papua memiliki hak lebih banyak untuk membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai maupun kepentingan mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah birokrasi politik yang korup. Akibatnya, banyak kebijakan dibuat dengan berpijak pada ketidakadilan. Sumber daya pun tidak mengalir secara merata untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat Papua.

Penegak hukum dari pemerintah Indonesia juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka terlibat langsung dengan industri pengolahan kayu maupun pertambangan di Papua. Beberapa di antara mereka juga bekerja sebagai „pasukan keamanan“ dari perusahaan-perusahaan yang ada di Papua. Ini tentunya bertentangan dengan tujuan utama penegak hukum, yakni melindungi rakyat secara keseluruhan. Pensiunan pejabat dan militer juga memiliki banyak investasi di bidang pertambangan maupun pengolahan kayu. Ini salah satu sebab utama, mengapa berbagai pelanggaran HAM di Papua sulit untuk diurai secara adil.<sup>7</sup>

Sebenarnya, masyarakat Papua tidak bermusuhan dengan berbagai industri yang berkembang di sana. Namun, mereka membenci sikap pendatang dan industri baru terhadap mereka. Inilah salah satu dorongan utama dari berbagai organisasi yang mendesak kemerdekaan Papua dari Indonesia. Di beberapa tempat, konflik sumber daya ini bahkan telah menelan korban jiwa. Ini ditambah dengan berkembangnya tingkat perdagangan di pasar gelap terkait dengan berbagai komoditi sumber daya alam yang ada.

## **2. Beberapa Rekomendasi Strategis**

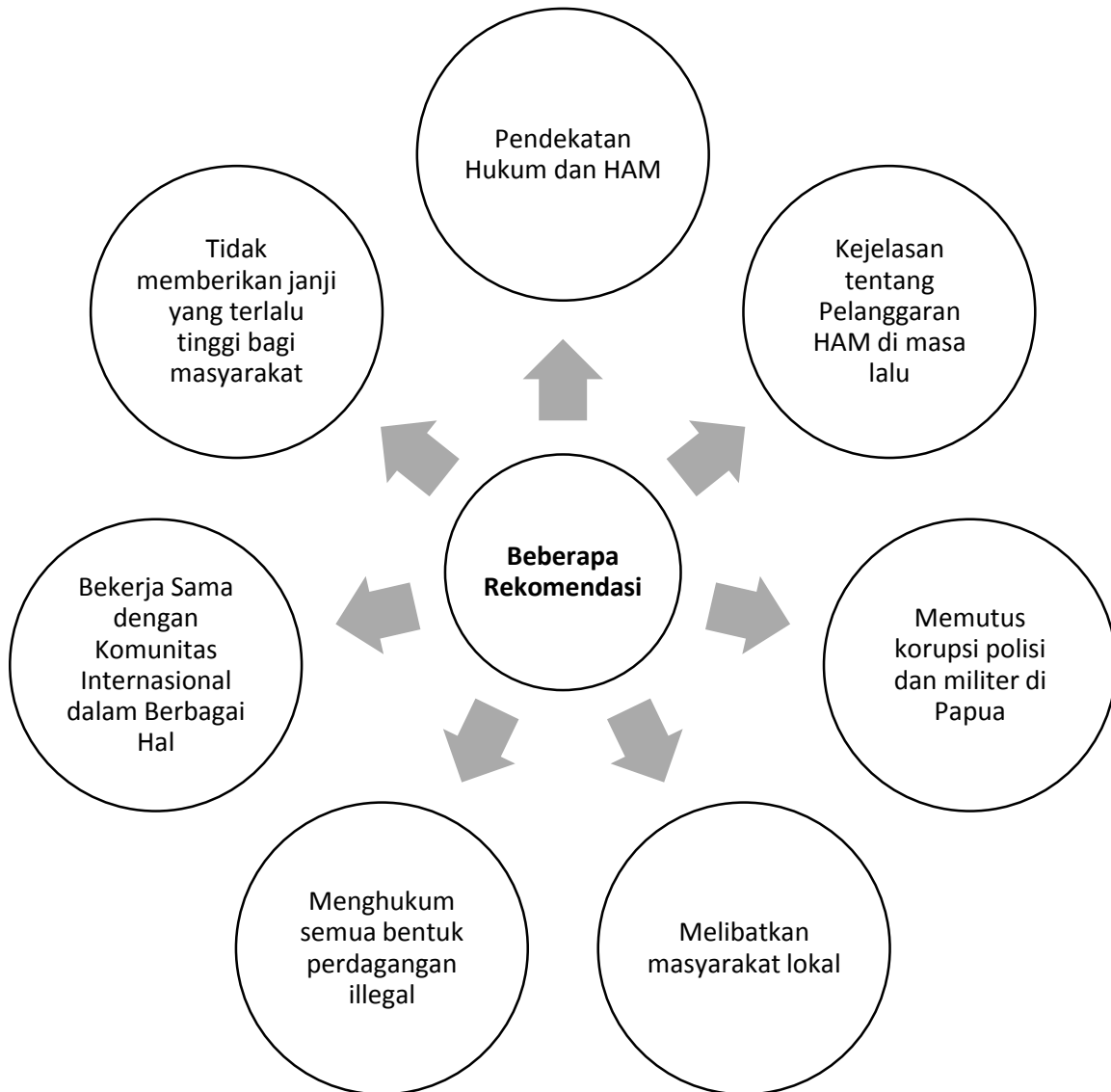
Terkait persoalan konflik sumber daya dan konflik di Papua, ada beberapa rekomendasi strategis yang bisa diberikan. Pertama, persoalan keamanan dan politik di Papua haruslah dilihat sebagai persoalan hukum dan HAM. Maka, pendekatan militer harus sedapat mungkin dikurangi. Ketegasan hukum juga harus diberikan kepada kelompok yang menciptakan kekacauan, seperti kelompok-kelompok radikal agamis. Pemantauan gerak kelompok-kelompok tersebut dalam koordinasi dengan pejabat lokal maupun tokoh masyarakat, termasuk juga kontrol penggunaan senjata api, haruslah dilakukan.

---

<sup>7</sup> Kerangka mengacu pada (Group 2002) Laporan dari International Crisis Group



**Bagan 2.**  
**Rekomendasi Untuk Konflik Papua**



Dua, semua keluhan terkait dengan pelanggaran HAM harus ditangani secara profesional. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menanggapi berbagai laporan pelanggaran HAM secara efisien dan efektif. Aparat penegak hukum juga dilibat sesuai dengan keperluan. Para pelaku pelanggaran HAM harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang juga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat setempat. Perusahaan yang terbukti melanggar aturan, apalagi

terlibat di dalam pelanggaran HAM, harus juga ditindak secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tiga, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memutus rantai hubungan antara perusahaan kayu dan pertambangan dengan militer maupun pejabat negara yang korup. Berbagai lembaga internasional kiranya bisa diajak bekerja sama dalam hal ini. Selama ini, persoalan ketidakadilan dan pelanggaran HAM sulit diurai, karena pelaku terhubung erat dengan militer maupun pejabat pemerintah yang berkuasa. Akibatnya, banyak persoalan, baik politik, ekonomi maupun HAM, tetap tak terselesaikan. Berbagai konflik terjadi, karena persoalan HAM dan ketidakadilan banyak terabaikan.

Empat, masyarakat lokal harus juga dilibatkan di dalam pengolahan kayu maupun sumber daya alam lainnya. Mereka bisa ditempatkan sebagai pengawas, supaya pengolahan sumber daya alam memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Masyarakat lokal juga harus diberikan ruang untuk menentukan perusahaan mana yang akan bekerja di tanah mereka. Jika sebuah perusahaan ataupun orang dinilai tak layak mengolah sumber daya alam yang ada, maka masyarakat lokal berhak menolak keberadaan mereka di tanah Papua. Ini tentu saja dilakukan dalam kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah Indonesia.

Lima, pemerintah Indonesia dan penegak hukum harus menindak semua bentuk perdagangan ilegal di Papua, terutama yang terakit dengan industri pengolahan kayu. Sampai detik ini, berbagai bentuk ekspor kayu sudah dilarang. Namun, pelanggaran kerap kali terjadi, bahkan dengan melibatkan pemerintah dan penegak hukum. Untuk ini, berbagai lembaga internasional kiranya bisa membantu. Peran masyarakat lokal juga amat penting dalam hal ini.

Enam, berbagai pelanggaran HAM juga harus kembali diselidiki. Korban dan keluarga korban perlu mendapat kompensasi dan keadilan yang selayaknya. Pelaku pun perlu ditemukan, dan dihukum sesuai dengan aturan maupun rasa keadilan masyarakat Papua. Pemerintah maupun perusahaan yang ada di Papua mungkin sulit untuk bersikap adil dalam hal ini. Maka dari itu, kerja sama dengan berbagai lembaga internasional kiranya juga diperlukan.

Tujuh, komunitas internasional kiranya juga perlu menegaskan, bahwa segala bentuk pelanggaran HAM di Papua akan mengurangi dukungan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Maka dari itu, komunitas internasional juga perlu lebih sering mengunjungi Papua. Pengetahuan langsung tentang keadaan di Papua amatlah penting. Ketegasan dari komunitas internasional kiranya bisa menekan pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih adil terhadap konflik di Papua. Kelompok masyarakat sipil kiranya juga masih membutuhkan dukungan dari komunitas internasional, terutama terkait pengungkapan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi.

Delapan, perusahaan juga perlu cermat di dalam melakukan investasi di Papua. Mereka perlu melakukan analisis mendalam tentang dampak langsung maupun tidak langsung dari investasi mereka. Jika merugikan masyarakat, atau merusak alam, maka investasi sebaiknya ditunda. Pun jika dilakukan, investasi tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham semata, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Hanya dengan begini, bisnis yang dibangun bisa lestari dalam hubungan dengan masyarakat yang lebih luas.

Sembilan, dalam soal bisnis, sedapat mungkin, peran militer dan polisi dikesampingkan. Dalam banyak kasus, keterlibatan militer dan polisi justru memperburuk keadaan. Masyarakat menjadi agresif dan reaksioner, ketika dihadapkan dengan pendekatan keamanan. Dalam segala persoalan, dialog adalah

jalan terbaik untuk memecahkan masalah. Jalur hukum bisa ditempuh, jika jalan dialog mengalami kebuntuan.

Sepuluh, pemerintah dan perusahaan yang bekerja di Papua sebaiknya tidak memberikan janji terlalu tinggi dan terlalu banyak pada masyarakat Papua. Untuk mencapai kesepakatan dengan masyarakat setempat, seringkali, pemerintah maupun bisnis membuat beragam janji. Ketika akhirnya sulit terpenuhi, masyarakat akan kecewa. Dalam jangka panjang, kekecewaan bisa menjadi dendam yang merupakan tanah subur untuk konflik. Pemerintah dan perusahaan tidak perlu berbohong untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat Papua.

### 3. Kesimpulan

Jantung hati masalah politik dan sumber daya di Papua adalah persoalan keadilan. Di tanah yang kaya, begitu banyak orang Papua hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Sementara, para pendatang mengeruk kekayaan Papua, dan menjadi kaya di luar batas akal sehat. Berbagai bentuk pelanggaran HAM juga sulit diungkap, karena melibatkan pejabat sipil dan militer di pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, keterlibatan komunitas internasional memainkan peranan penting untuk membantu mengurai konflik, dan mencari jalan keluar damai. Ini semua tentu tak berguna, tanpa kehendak baik sekaligus kebijakan yang jernih dari pemerintah Indonesia. Tanpa upaya ini, Papua akan terus bergejolak.

### Daftar Acuan

- Group, International Crisis. 2002. *INDONESIA. RESOURCES AND CONFLICT IN PAPUA*. Jakarta dan Brussel.
- Irawan, Wahyu Candra. t.thn. *ESSC*. Diakses Desember 2019. <https://essc.org.ph/content/view/606/163/>.
2019. *Kompas*. Desember. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/21/09595181/industrialisasi-dan-eksploitasi-dinilai-jadi-akar-konflik-dan-kekerasan-di?page=all>.
- Nicky Aulia Widadio, Muhammad Nazarudin Latief |. t.thn. Diakses Desember 2019. <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/riwayat-konflik-papua-tanah-kaya-di-ujung-timur-indonesia/1635906>.
- t.thn. *Papua Web*. Diakses 2020. <http://papuaweb.org/gb/peta/p-pwb/papua-umum-57k.gif>.